



**LSM Indonesia: isu, arena
dan tantangan baru
mengawal demokrasi**

Arie Sujito, sosiolog UGM



Konteks isu

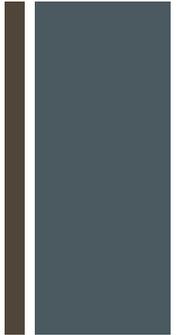
- ❑ Capaian demokrasi sejauh ini
- ❑ Perubahan cara pandang
- ❑ Problem mendasar
- ❑ Tantangan ke depan



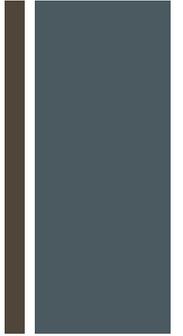
Capaian demokrasi

- Reformasi telah menghasilkan banyak perubahan mendasar; meningkatnya partisipasi masyarakat sipil pada berbagai isu, sektor dan arena dengan ragam skala atau cakupan
- Set-up kelembagaan dan reformasi tata kelola pemerintahan, desentralisasi dan hubungan pusat daerah, perbaikan sistem pemilu, reformasi kebijakan sosial dan pembangunan, serta penanganan soal hukum dan HAM
- Perjalanan dan capaian demokrasi, tentu membutuhkan pengawalan oleh karena potensi terjadi kemerosotan kualitas demokrasi politik tidak bisa dielakkan
- Sebagian besar harapan kelangsunga keseimbangan dan keberlanjutan demokrasi, justeru ditumpukan pada

+ Perubahan cara pandang



- Jumlah, LSM terus meningkat tentu dengan keragaman fokus isu, cakupan area maupun kualitas masing-masing.
- Demokratisasi, berkonsekuensi pada perubahan cara pandang yang memberi makna baru LSM sebagai aktor demokrasi;
- Ada banyak hal baru dari sisi arena, strategi dan pilihan isu agar capaian kerja LSM bisa mendukung demokrasi berkelanjutan yang inklusif

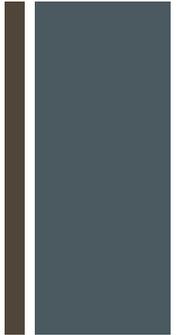


- **Arena advokasi bagi LSM lebih luas dan beragam;**
 - Pilihan strategi luar dengan advokasi kasus-kasus yang dialami masyarakat,
 - *Intermediary agencies* yang menghubungkan policy maker dan masyarakat *grassroot*, serta,
 - pilihan asistensi pada lembaga strategis di aras negara
- **Kesemua itu untuk memastikan demokrasi kian bermakna;**
 - Yakni kebijakan lebih baik dan berkualitas serta masyarakat sipil kian berdaya dan memiliki pengaruh



Ironinya,..

- LSM, yang berperan mendorong transformasi demokrasi, seringkali justru tidak banyak memiliki akses pembangunan dengan ragam argumen:
 - Pandangan lama, yang menganggap NGO (*non government organisasion*) harus cari sumber dana di luar anggaran negara (APBN) dengan alasan independensi, netral, non partisan dan sebagainya
 - Sementara sumberdaya LSM dari hibah donor mitra luar negeri) seringkali juga dituduh



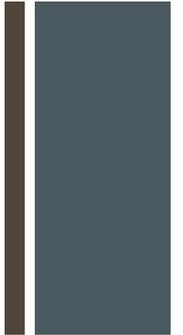
- LSM juga telah menyumbang pajak dengan ragam kegiatan atau programnya, juga berhasil membantu masyarakat akibat keterbatasan daya jangkau negara mengatasi problem sosial (sebagaimana disajikan di depan)
- Konstruksi yang secara politis mereproduksi LSM dianggap sumber keributan; sikap kritis dengan ragam bentuknya

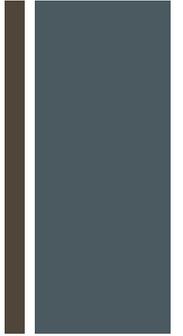
Problem mendasar

- + Terpaan krisis global yang menimpa dunia akibat dari pandemi covid19, rentetan dampak risiko ekonomi nasional serta, dalam beberapa hal telah berdampak pada kondisi ekonomi dan pembiayaan masyarakat yang dimaknai sebagai momentum untuk memberi perhatian eksistensi dan masa depan LSM Indonesia
- Selama ini sebagian besar sumber pendanaan LSM berasal dari hibah bantuan mitra-mitra pembangunan luar negeri, sementara konteks krisis diatas, keperluan keberlanjutan lembaga serta beberapa keterbatasan membutuhkan jalan

+ Tantangan ke depan

- Tema peningkatan kapasitas organisasi, SDM, serta kemampuan kelola sumberdaya keuangan bagi LSM sebagai aktor demokrasi, menjadi konteks yang melandasi pentingnya formulasi bantuan pendanaan
- Apalagi bantuan internasional disertai jumlah organisasi internasional yang bekerja di Indonesia mengalami penurunan dalam dekade terakhir.
- Risikonya, telah mempengaruhi berbagai organisasi lokal yang sebelumnya banyak bekerja sama dengan LSM internasional dengan ragam bentuknya
- Inilah tantangannya, sekaligus mendorong upaya melakukan diversifikasi sumber pendanaan lokal, baik mencari pendapatan sendiri, atau akses dana dari sektor publik.





- Pendanaan dari pemerintah, dengan sumber tertentu, menjadi alternatif penting sebagai bentuk komitmen penguatan LSM yang selama ini telah bekerja untuk masyarakat dalam skema demokrasi
- Kue dan akses pembangunan hendaknya dikelola secara berkeadilan, berpegang prinsip demokrasi yang bermakna, bukan sekadar pertumbuhan pembangunan dengan dasar teknis administratif, namun demokratisasi pembangunan yang sejahtera dan akuntabel secara sosial

Kuncinya

- ❑ Perubahan cara pandang peran LSM yang tidak lagi terjebak pada “hitam putih” peran sebagaimana model lama pada era otoriterisme, sebaliknya demokrasi makin tersedianya ruang negosiasi dengan orientasi tata kelola akuntabel, pelibatan kontrol publik
- ❑ Pendanaan LSM juga dimaksudkan membangun legitimasi sosial dengan partisipasi publik;
- ❑ Kita perlu mengombinasi antara teknokrasi (pemerintah), politik

